

PRAKIRAAN CUACA HARI INI

PASER	KUKAR	BERAU
Hujan Petir	Hujan Ringan	Berawan
KUBAR	KUTIM	PPU
Hujan Petir	Berawan	Hujan Ringan
MAHULU	BALIKPAPAN	SAMARINDA
Cerah Berawan	Hujan Ringan	Hujan Ringan
BONTANG		
Hujan Ringan		

SUMBER: BMKG.GO.ID

Soroti Ketimpangan Penyaluran Insentif

TANJUNG REDEB – Pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Berau periode baru yang digelar di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau pada Kamis (21/11) tidak hanya menjadi seremoni pengukuhan organisasi.

Momen tersebut justru menjadi ruang evaluasi terhadap mekanisme penyaluran insentif guru ngaji yang dinilai masih menyisakan ketimpangan, terutama di kampung-kampung.

Abdurrahman, yang kembali dipercaya memimpin BKPRMI Berau, menyoroti persoalan terbesar bukan hanya soal nominal insentif Rp 1.250.000 per bulan, tetapi carut-marutnya sistem pembayaran yang terpecah antara pemerintah kampung dan Bagian Kesra Setkab Berau.

Kondisi ini, disebutnya, membuat nilai insentif yang diterima guru ngaji tidak merata.

“Di lapangan, kami temukan ada guru ngaji yang seharusnya menerima Rp 1.250.000, tapi yang turun hanya Rp 500 ribu. Ini bukan sekadar selisih, tapi ketidakadilan,” tegasnya.

Dari sudut pandang BKPRMI, solusi utama bukan hanya menaikkan insentif menjadi Rp 1.500.000, melainkan memusatkan kembali penyalurannya agar tidak ada lagi campur tangan berlapis yang berpotensi menimbulkan disparitas.

Ketua DPW BKPRMI Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menilai wacana tersebut realistis, meski tetap bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Jika belum bisa terealisasi pada 2026, maka tahun 2027 bisa menjadi tahapan berikutnya.

Staf Ahli Bupati Berau, Warji, mengakui problem penyaluran insentif memang sudah lama dikeluhkan. Ia menilai tambahan Rp250 ribu per orang bukan angka besar bagi APBD, namun akan sangat berdampak bagi para pengajar Al-Qur'an tersebut.

Ia pun meminta agar persoalan pemusatan penyaluran dan peningkatan insentif dibahas serius dalam anggaran daerah. (ri/han/mm)



ILUSTRASI/NET

Di lapangan, kami temukan ada guru ngaji yang seharusnya menerima Rp 1.250.000, tapi yang turun hanya Rp 500 ribu.

ABDURRAHMAN
Ketua
DPD BKPRMI

Sampaikan Laporan Evaluasi Progres Pengelolaan JDIH DPRD

TENGGARONG – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris DPRD, M Ridha Darmawan dan Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Perundang Undangan Nurhayati Touristiany beserta tim menyampaikan laporan evaluasi serta progres pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kukar kepada Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani pada Senin (27/10).

M. Ridha Darmawan mengapresiasi perkembangan signifikan dalam pengelolaan JDIH sepanjang tahun berjalan, yang meliputi peningkatan kualitas dokumentasi, layanan informasi hukum, serta modernisasi sistem berbasis digital. Progres ini merupakan komitmen DPRD Kukar dalam mendukung transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta pemenuhan hak publik terhadap akses informasi hukum.

Menurutnya, JDIH DPRD Kukar telah berhasil memper-



ISTIMEWA

SAMPAIKAN LAPORAN: Pelaporan yang dilakukan Tim JDIH DPRD ke Ketua DPRD Kukar.

baharui dan mempublikasikan berbagai produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, risalah persidangan, serta dokumen pendukung lainnya.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif tersebut. Ia menekankan pentingnya JDIH sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung kinerja legislatif serta pelayanan kepada publik. Serta terus men-

ingkatkan penyebaran informasi dan dokumentasi hukum menyediakan akses mudah yang terpadu, lengkap, akurat, mudah, dan cepat terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

“Peran JDIH DPRD Kukar sudah sangat baik dan optimal, kami tentu siap memberikan dukungan penuh,” tegas Ketua DPRD Kukar. (hei/han/mm)



Menyongsong Indonesia Emas 2045

Pilar Supremasi Hukum dan Akses Informasi Publik

Kunjungi Kami di :

website:
<https://jdihdprd.kukarkab.go.id/>

<https://www.instagram.com/jdih.dprdkukar/>

<https://www.youtube.com/@jdihdprdkabkukar>

<https://www.tiktok.com/@jdihdprdkukar>

<https://www.facebook.com/profile.php?id=61554746226007>

Seminar MLF 2025: Media, Regulasi, dan Demokrasi

Ajak Publik Memahami Tantangan Baru Media

SAMARINDA – Seminar Mulawarman Law Fair (MLF) 2025 yang digelar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menghadirkan pembahasan menarik mengenai dinamika hubungan antara media, regulasi, dan ruang demokrasi.

Mengangkat tema “Democracy Under Duress: Press, Law, and the Battle of Narratives”, forum ini menekankan pentingnya memperkuat peran media sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat.

Pemimpin Redaksi Koran Kaltim, Supiyansyah selaku salah satu pemateri meny-

ampaikan, tantangan media saat ini lebih banyak muncul dalam bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan pola hubungan kelembagaan. Ia menilai bahwa dinamika tersebut membuat media perlu lebih cermat menjaga keseimbangan antara independensi dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi publik.

“Tekanannya bukan lagi seperti dulu. Sekarang lebih kepada bagaimana media berhadapan dengan regulasi dan relasi kelembagaan yang terus berkembang,” ucapnya dengan nada reflektif di Gedung Prof Masjaya

Unmul, Jumat (21/11).

Menurutnya, perubahan ini menuntut media untuk menata ulang strategi keberlanjutan, termasuk mendorong diversifikasi pendapatan agar tidak bergantung pada satu sektor saja.

Supiyansyah menjelaskan, proses pengambilan keputusan di redaksi kini semakin kolektif. Setiap isu sensitif dipertimbangkan melalui diskusi bersama, melibatkan redaktur hingga manajemen, demi memastikan keamanan jurnalis, kemampuan perusahaan, dan tetap terjaganya man-

faat berita bagi publik.

“Intinya, media harus bijak membaca situasi dan tetap berpegang pada etika,” tambahnya.

Akademisi Fakultas Hukum Unmul, Hairan mengatakan, fenomena ini merupakan bagian dari proses adaptasi media terhadap perkembangan demokrasi. Mereka menekankan pentingnya memperkuat literasi hukum dan etika, baik di kalangan jurnalis maupun masyarakat. Agar narasi yang beredar tetap sehat dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.

“Pemerintah dituntut transparan, media tetap independen, dan masyarakat perlu kritis serta memiliki kecakapan dalam menyaring informasi,” ujarnya.

Seminar yang berlangsung di Gedung Masjaya Universitas Mulawarman itu dihadiri mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Selain menjadi ruang dialog, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat pemahaman publik tentang bagaimana media bekerja dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga alur informasi yang bertanggung jawab. (mr623/han/mm)

Pokja 30: Hati-hati dalam Pelaksanaan Program UKT Gratis

SAMARINDA – Direktur Pokja 30, Buyung Marajo mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur agar lebih cermat dalam menjalankan program Uang Kuliah Tunggal (UKT) Gratis.

Buyung menegaskan, bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang telah diamanatkan undang-undang. Karena itulah pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk beasiswa dan UKT Gratis, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Apalagi 20 persen dari APBD adalah mandatori untuk sektor pendidikan, sehingga setiap rupiah harus diren-

canakan dan dimanfaatkan secara tepat,” ujar Buyung, Jumat (21/11).

Menurutnya, program beasiswa maupun bantuan pendidikan tidak cukup hanya digelontorkan tanpa kerangka perencanaan yang kuat. Regulasi yang menjadi payung hukum harus jelas, sehingga pembiayaan pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pokja 30 belum juga pernah melihat evaluasi terhadap program-program beasiswa sebelumnya, seperti Beasiswa Kaltim Tuntas atau Kaltim Cemerlang. Dampaknya tidak pernah diketahui,” ucapnya.

Ia khawatir, tanpa adanya

evaluasi yang komprehensif, kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program beasiswa masa lalu berpotensi terulang dalam pelaksanaan UKT Gratis. Selain itu, Buyung meminta Pemprov Kaltim tidak melibatkan kembali pihak-pihak yang sebelumnya pernah bermasalah dalam pengelolaan beasiswa.

“Pemerintah harus memastikan capaian program betul-betul meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Buyung juga menyoroti minimnya ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan. Menurutnya,

masyarakat sebagai penerima manfaat seharusnya dilibatkan, karena merekalah yang paling mengetahui persoalan di lapangan.

“Gubernur dan wakil gubernur hanya menerima laporan berkala, sementara masyarakat yang langsung merasakan manfaat atau masalahnya,” tegasnya.

Kata Buyung, kepala daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Apalagi program UKT Gratis merupakan salah satu janji politik yang harus direalisasikan dengan baik. Buyung juga mengingatkan, pemenuhan hak pendidikan

bukan hal baru, karena sudah diatur dalam undang-undang.

“Sebab ini sudah ada mandatori spending-nya 20 persen untuk pendidikan, makanya anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan pada UKT Gratis, tetapi juga harus memperhatikan dukungan infrastruktur pendidikan,” jelasnya.

“Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program ini, dan tidak hanya fokus pada program UKT Gratis, tetapi juga pada pemenuhan dasar infrastrukturnya di setiap daerah,” pungkasnya. (su/han/mm)